BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memperoleh kesamaan pemahaman mengenai judul penulisan skripsi ini, maka perlu ditegaskan dengan menguraikan istilah-istilah fungsional yang terdapat didalamnya, sehingga perbedaan interpretasi tentang judul ini dapat dihindari.

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo

Pemahaman berarti proses perbuatan, cara memahami atau memahamkan.[1] Kata pemahaman sama artinya dengan kata *Syarh* dalam bahasa Arab, yang berarti menjelaskan atau menafsirkan.[2] Usaha memahami tidak mungkin dapat dipisahkan dari usaha menafsirkan dan begitu pula sebaliknya, dan sama pula artinya dengan kata *Fiqh:* pemahaman.

Sedangkan, Muhammad Dawam Rahardjo, adalah salah satu dari sejumlah intelektual muslim yang kerap kali mengajukan gagasan keislaman modern, rasional, dan cenderung liberal yang erat kaitannya dengan tema-tema politik, ekonomi, HAM, sosial, budaya hingga agama,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988), hlm. 636

[2] Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam al- Wasit*. (Kairo, t.p, 1972), hlm. 477

yang sekaligus erat kaitannya dengan tema-tema pokok gagasan *civil society.*

Istilah *civil society*, oleh Dawam di terjemahkan di sini sebagai mesyarakat madani. Namun, istilah tersebut di kembangkan berdasarkan pada perspektif agama sebagai dasar pemahaman. Konsep masyarakat madani menurut M. Dawam Rahardjo sebenarnya identik dengan cita-cita Islam membangun *ummah.*[3] Itulah sebabnya M. Dawam Rahardjo dengan hati-hati tidak menyebut masyarakat madani sebagai sesuatu yang identik dengan *civil society.* Namun demikian, Dawam setuju jika secara konseptual teori-teori *civil society* sangat berguna bagi pengembangan wacana masyarakat madani. Bahkan sebagaimana sering di ungkapkan, Dawam lebih melihat bahwa masyarakat madani sesungguhnya lebih dekat dengan konsep *khairu ummah* yang termaktub dalam QS. Ali Imran: 110.[4]

Dalam rangka pengembangan wacana masyarakat madani (civil society), Dawam pun bergerak melalui berbagai lembaga kajian sosial keagamaan seperti Yayasan Paramadina atau Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF). Semua itu merupakan modal dasar bagi pengembangan wacana *civil society* dan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo dalam pembahasan ini adalah penyelidikan atau kajian

---

[3] M. Dawam Rahardjo, "Agama dan Masyarkat Madani", dalam Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-cita Reformasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002), hlm.178

[4] M. Yunan Yusuf (et. al), *Masyarakat Utama*, (Jakarta, Pusat Dakwah Muhammadiyah, 1995)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penjelasan atau penafsiran Muhammad Dawam Rahardjo yang dalam hal ini tentang *khairu ummah.*

2. ***"Khairu ummah"***

Istilah *khairu ummah,* terdapat dalam Al- Qur'an Surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman :

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang kebaikan (ma'ruf) dan mencegah dari yang buruk (munkar), dan beriman kepada Allah"

Muhammad Ali, dalam tafsir *The Holy Qur'an,* menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan *khairu ummah* adalah umat Islam atau kaum muslim. Namun, untuk memberikan definisi yang lebih konkret tentang *khairu ummah,* M. Dawam Rahardjo, mengkorelasikan ayat tersebut dengan QS Ali Imran: 104 dan QS Al-Baqarah: 143. dengan manganalisis kata kunci yang terdapat di dalam kedua ayat tersebut yaitu kata *al khairu* yang terdapat pada ayat 104 Ali Imran, kemudian *ummatan wasathan* yang terdapat pada QS Al-Baqarah: 143. di sini Dawam memberi penjelasan tentang *khairu ummah* yang dimaksud adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan orientasi kepada *al khair,* memiliki mekanisme *amar ma'ruf nahi munkar,* aturan, tatanan atau pemerintahan yang adil, dan beriman kepada Allah. Dengan demikian, maka *al ummah* yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mengemban misi di atas, bisa berbentuk negara atau masyarakat madani *(civil society)* [5]

3. Masyarakat Madani

Di Indonesia, Istilah "masyarakat madani" pertama kali dimunculkan oleh mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam ceramahnya di Festival Istiqlal 1995, dan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari *"civil society"*.[6]

Menurut Nurcholish Madjid, kata "Madani" merujuk pada Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yatsrib di wilayah Arab, dimana masyarakat Islam dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dimasa lalu pernah membangun peradaban tinggi. Kata "madinah" berasal dari bahasa Arab "madaniyah", yang berarti peradaban atau "kota". Karena itu, masyarakat madani berasosiasi "masyarakat beradab" atau masyarakat kota [7]

Masyarakat madani menurut paradigma Islam adalah masyarakat yang berdasarkan iman kepada Allah. Sebab, iman kepada Allah akan membuat kehalusan dan ketinggian moral dan kesadaran sosial yang tinggi. Semua prinsip-prinsip dan nilai-nilai dari Allah menjadi dasar semua aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya.[8]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, LP3ES, 1999), hlm. 118-122

[6] *Ibid*, 145

[7] Nurcholish Madjid,"Menuju Masyarakat Madani", dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996, hlm. 51

[8] Setiawan Budi Utomo, "Doktrin Khoiro Ummah Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Masyarakat Islam", Pengantar Penerjemah dalam Yusuf Al-Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar), hlm.xiv

Menurut M. Dawam Rahardjo bahwa masyarakat madani lebih dekat dengan konsep "Masyarakat Utama", yaitu masyarakat yang beriman yang memiliki sistem kelembagaan yang mampu berfungsi menegakkan yang baik *(amar ma'ruf)* dan mencegah yang buruk *(nahi munkar)* dan berorientasi kepada nilai-nilai keutamaan *(al Khairu)* masyarakat seperti ini adalah masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa banyak tekanan-tekanan dan pengaturan dari lembaga politik pemaksa *(coursive)* eksternal, yang seringkali mampergunakan kekerasan *(violence)*[9]

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka maksud dari judul " Pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo Tentang *"Khairu ummah"* Dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran: 110 Hubungannya dengan Masyarakat Madani" ini adalah, penelusuran, penyelidikan atau kajian data tentang penjelasan, penafsiran Muhammad Dawam Rahardjo tentang *khairu ummah* dan hubungannya dengan Masyarakat Madani atau masyarakat utama dengan pemaknaan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan umum *(khairu)*, mampu menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang berbentuk persekutuan, perhimpunan, asosiasi (integrasi sosial) yang memiliki visi dan pedoman prilaku serta mampu mengatur dirinya sendiri tanpa banyak mendapatkan tekanan-tekanan dari lembaga politik pemaksa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] M. Dawam Rahardjo, *Op, Cit*, hlm. 117

B. Latar Belakang Masalah

Lengsernya Orde Baru disebut-sebut sebagai kemenangan *civil society*. Berkat aliansi dari gerakan mahasiswa, kelas menengah, LSM, dan sejumlah intelektual reformis telah memaksa Suharto untuk melepaskan jabatan kepresidenannya. Bersamaan dengan bergulirnya proses demokratisasi, perbincangan sekitar *civil society* serta merta muncul kepermukaan, karena ada persepsi suksesnya demokratisasi hanya dimungkinkan jika terdapat *civil society* yang kuat.

Penciptaan dan pemupukan *civil society* atau "masyarakat warga" atau "masyarakat madani", adalah salah satu usaha kearah pembentukan yang bukan saja diinginkan, tetapi juga diperkirakan dapat mengelakkan kita dari pengurangan pengalaman, yaitu transformasi cita-cita demokratis menjadi tatanan kenegaraan yang otoriter.[10] Perlu dimengerti salah satu hal yang sangat menonjol dalam perkembangan politik selama Orde Baru adalah semakin mekar dan kokohnya kekuatan negara di Indonesia. Negara menjelma menjadi suatu *supra institusi*. Demikian besarnya kekuatan negara, sehingga ia seakan-akan mampu menyerap hampir semua kegiatan politik ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai agama dalam pengertian konstitusional.[11] Hal ini semakin transparan ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan Azaz Tunggal Pancasila dan polarisasi Partai Politik, dari sistem multipartai menjadi tripartai yakni Golkar, PPP, dan PDI. Padahal realitas menunjukkan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Lihat Taufik Abdullah, sebuah pengantar untuk M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, LP3ES, 1999), hlm. xx

[11] Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokrasi Dalam Islam Indonesia*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), hlm. 232.

bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, pluralistik dan merindukan kebebasan.

Sejak paruh kedua dekade 1990 an, terjadi perubahan-perubahan politik yang cukup signifikan, yang oleh sementara pengamat dipandang sebagai pendorong proses demokratisasi dan perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Kalangan Muslim yang sebelumnya berada pada margin politik, mulai masuk ketengah kekuasaan. Pada saat yang sama, proses demokratisasi kelihatannya menemukan momentum baru; beberapa katup bagi ekspresi dan eksprimen demokrasi yang selama ini tertutup, pelan-pelan mulai terbuka, sehingga mendorong maraknya pro demokrasi, yang secara keliru sering dipandang sebagai salah satu faktor paling penting bagi penciptaan masyarakat madani.[12]

Tetapi apakah masyarakat madani (*civil society)* itu?, [13] dan bagaimana prospek pertumbuhan masyarakat madani atau masyarkat sipil *(al mujtama'al madani)* di Indonesia?[14] Pertanyaan ini wajar diajukan ketika kita melihat beberapa perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, setidaknya dalam dua dasawarsa terkhir ini, dan lebih khusus setelah Soeharto *Lengser keprabon.* Apakah masyarakat madani bisa menjadi karakter terpenting dari "Indonesia Baru" yang sedang diusahakan membangunnya dalam masa reformasi ini?. [15]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Azyumardi Azra, "Prospek Masyarakat Madani: Menuju Indonesia Baru", dalam M. Dawam Rahardjo (Ed), *Mewjudkan Satu Ummat,* (Jakarta, Pustaka Zaman, 2002), hlm. 104.

[13] Lihat Taufik Abdullah, *Op, Cit,* hlm. xx

[14] Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan,* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. v.

[15] *Ibid*

Hampir semua kalangan yang terlibat dalam diskursus intelektual mengenai *civil society*, sepakat terhadap adanya potensi itu. Tidak mengherankan bila belakangan terjadi perkembangan yang cukup menarik, yakni *civil society* tidak lagi sekedar dijadikan sebagai bahan perbincangan yang bersifat teoritik, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk pembentukan institusi-institusi sosial yang berbasis *civil society*.[16]

Sebagai sebuah wacana yang diperdebatkan, masyarakat madani sebenarnyanya istilah baru yang muncul sejak paruh pertama dasawarsa 1990 an. Istilah masyarakat madani mulai digunakan di Indonesia sejak 1995 setelah diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Festival istiqlal. Dalam makalahnya, Anwar mencatat bahwa masyarakat madani, yang dinyatakannya sebagai terjemahan dari *civil society* dalam bahasa Inggris atau *al mujtama' al madani* dalam bahasa Arab, adalah masyarakat bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas, dimana masyarakat memiliki daya dorong usaha dan inisiatif individual. Lebih lanjut, Anwar merumuskan konsep masyarakat madani sebagai berikut:

> Kemelut yang diderita oleh ummat semasa seperti meluasnya keganasan, sikap melampaui dan tidak tasamuh; kemiskinan dan kemelaratan; ketidak adilan dan kebejatan sosial, kejahilan, kelesuan intelektual dan kemuflisan budaya adalah manifestasi kritis masyarakat madani. Kemelut ini kita saksikan dikalangan masyarakat Islam baik di Asia maupun Afrika, seolah-olah ummat terjerumus kepada salah satu kezaliman. Kezaliman akibat kediktatoran atau kezaliman yang timbul dari runtuhnya atau ketiadaan order politik serta peminggiran rakyat dari proses politik.[17]

---

[16] Syamsul Arifin, *Islam Indonesia; Sinergi Membangun Civil Islam Dalam Bingkai Keadaban Demokrasi*, (Malang, UMM Pres, 2003), hlm. 60.

[17] Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani" dalam Aswab Mahasin (Ed), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa*, (Jakarta, Yayasan Festival Istiqlal, 1999),hlm. 22.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Di sini, Anwar Ibrahim mengamati fenomena sosial-politik didunia Islam. Anwar mengakui bahwa kondisi umat Islam dewasa ini memang jauh dari cita-cita masyarakat madani. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini masyarakat muslim, khususnya di Asia dan afrika, masih harus berjuang menghadapi persoalan-persoalan serius seperti kemiskinan, ketidak adilan, ketidaktoleran, kerakusan ekonomi, kebejatan sosial, politik dan budaya serta kelesuan intelektual yang disebabkan oleh kekuasaan otoriter, ketiadaan stabilitas politik dan peminggiran hak-hak politik rakyat. Karena itu, tugas kaum muslimin yang dapat dipandang sebagai suatu perjuangan moral terpenting dewasa ini adalah melakukan pembenahan kedalam tubuh ummat untuk menghapuskan kemiskinan, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi serta merangsang kemajuan intelektual.[18]

Konsep masyarakat madani yang diungkap Anwar memang bisa dikatakan masih terlalu umum. Namun desakan intelektual tentang perlunya membangun suatu tatanan masyarakat di negara-negara muslim, yang mendekati cita ideal masyarakat madani itu, mempunyai dampak yang cukup berarti dalam menggugah perhatian masyarakat Muslim perkotaan di Indonesia terhadap wacana tentang masyarakat madani. Tak heran jika beberapa istilah pernah digunakan untuk merujuk pada suatu idealisasi masyarakat dambaan ini seperti istilah "masyarakat sipil", "masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] Hendro Prasetyo, Ali Muhannif, dkk, *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2002), hlm.158.

kewargaan" atau "masyarakat warga" dan "masyarakat utama" dengan corak dan karakteristik masing-masing[19]

Secara khusus, Muhammad Dawam Rahardjo menggunakan istilah "masyarakat utama" sebagai padanan kata masyarakat madani. Kelihatannya istilah ini di inspirasikan oleh kata *khairu ummah* yang terdapat dalam Al-Qur'an Allah berfirman

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

" kamu adalah umat yang terbaik (umat yang unggul) yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang baik (ma'ruf) dan mencegah yang buruk (munkar), dan beriman kepada Allah".[20]

Dalam mencermati ayat di atas, M. Dawam Rahardjo memberikan penafsiran tentang *khairu ummah* dengan menggunakan metode tafsir *al-Mawdlu'i* atau tafsir tematis. Tafsir ini bukannya membahas seluruh al-Qur'an atau surat tertentu, melainkan membahas tema tertentu yang di dukung oleh ayat-ayat al-Qur'an.[21]

Metode penafsiran secara *mawdlu'i* atau tematis ini, menurut Dawam akan memberikan perspektif baru dalam upaya penafsiran al- Qur'an. Cara penafsiran ini memang di pengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial budaya. Dari kacamata ilmu-ilmu sosial budaya itu akan timbul ide-ide baru, ketika kita membaca al-Qur'an, kita bisa bertolak dari suatu konsep ilmu-ilmu sosial dan mencari keterangannya dari al-Qur'an sebagai sumber petunjuk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] *Ibid.* hlm.161.

[20] Q.S. Ali Imran Ayat : 110

[21] M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta, Paramadina, 2002), hlm. 4.

Dengan begitu al- Qur'an bisa di siarkan dan di budayakan secara partisipatif oleh banyak orang dari sudut keahlian yang berbeda-beda.[22]

Atas dasar itulah, menurut M. Dawam Rahardjo agar kaum muslimin_ dari berbagai tingkat pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan intelektual bisa melakukan komunikasi secara langsung dengan al- Qur'an. Karena bagi Dawam, al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang merupakan petunjuk *(hudan)*, dan rahmat bagi sekalian manusia. Manusia di sini, bukan hanya orang-orang tertentu, seperti para ulama' yang sering di anggap mempunyai hak istimewa atas kitab suci_ melainkan setiap Muslim pun mempunyai akses langsung kepada al- Qur'an.[23]

Dengan alasan ini pula, penulis mempunyai persepsi bahwa, M. Dawam Rahardjo adalah sosok intelektual yang telah mengaplikasikan apa yang telah di wacanakannya. Sebab, al- Qur'an yang terdiri dari 30 juz 6666 ayat itu, menurut Dawam tentu tidak cukup mewakili persoalan umat yang kian hari terus bertumpuk dan terus berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah manusia maupun usia zaman. Namun, al- Qur'an yang terbatas dari sisi jumlah ayat itu memiliki sifat universal, yang berarti terbuka untuk di tafsirkan menurut konteks zamannya sehingga kedudukan al-Qur'an tetap *up to date* sepanjang zaman. Untuk itulah, M. Dawam Rahardjo mengemukakan :

> Keterlibatan manusia untuk mewacanakan istilah di dalam al- Qur'an merupakan keharusan historis dari tuntutan kompleksitas sosial, karena al- Qur'an tidak akan bermakna bagi manusia dan lingkungannya tanpa intervensi rasionalitas manusia sendiri di dalamnya.[24]

---

[22] *Ibid*, hlm. 10
[23] *Ibid*, hlm. 11
[24] M. Dawam Rahardjo, *Mewujudkan Satu Ummat*, (Jakarta, Pustaka Zaman, 2002), hlm. xii-xiii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan demikian, ide masyarakat madani yang digulirkan oleh Muhammad Dawam Rahardjo dengan berlandaskan pada konsep *"khairu ummah"* tidak dapat dikatakan sebagai terjemahan dari konsep *civil society*, melainkan tampaknya lebih merupakan justifikasi teoritis atas integrasi Islam dengan negara yang sedang berlangsung sampai saat sekarang.

Bertolak dari hal tersebut, penulis tertarik, kemudian mencoba menela'ah lebih jauh pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo tentang *khairu ummah* yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Ali Imran: 110 serta hubungannya dengan masyarakat madani.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo tentang *"khairu ummah"* dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat : 110 ?
2. Bagaimana perwujudan *khairu ummah* hubungannya dengan masyarakat madani dalam konteks keIndonesiaan menurut Muhammad Dawam Rahardjo ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Penelitian ini bertujuan :

   a. Untuk mengetahui pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo tentang konsep *"khairu ummah"* hubungannya dengan masyarakat madani dalam konteks ke Indonesiaan.

   b. Untuk mengetahui kontribusi pemahaman Muahammad Dawam Rahardjo tentang *khairu ummah* hubungannya dengan mayarakat madani dalam pemberdayaan masyarakat

2. Manfaat Penelitian

   a. Diharapkan dapat memperjelas arti penting dan implementasi *khairu ummah* hubungannya dengan masyarakat madani dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

   b. Memberikan sumbangsih pengetahuan bagi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan lainnya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Tela'ah Pustaka

A. Pemahaman Tentang Al- Qur'an Surah ali Imran: 110

1. Khairu ummah

Term *khairu ummah* yang terdapat dalam surah Ali Imran:110. *ummah* dalam ayat tersebut bermakna golongan manusia yang menganut agama tertentu, misalnya umat Yahudi, umat Nasrani dan umat Islam.

Kata *ummah* dalam ayat tersebut sangat erat kaitannya dengan kata *ummah* dalam surah Ali Imran:104,[25] yakni merupakan sebuah entitas yang memiliki karakter etis, berupa kecenderungan kepada sifat-sifat utama *(al khair)*. Entitas ini memiliki fungsi dan tugas profetik-transformatif berupa menyerukan kebaikan *(amar ma'ruf)* dan mencegah kemungkaran *(nahi munkar)*. *Ummah* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sekelompok tertentu dalam masyarakat, bisa organisasi pemerintahan *(government)*, atau negara *(state)*, sebagai bagian masyarakat.[26] Ayat 110 surah Ali Imran, lebih menjelaskan model masyarakat terbaik. Menurut ayat ini adalah terdapatnya mekanisme kelembagaan maupun non kelembagaan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* serta penduduknya beriman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] *"Dan hendaklah ada diantara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebajikan (al khair), menegakkan yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar, merekalah yang akan mencapai kejayaan."*

[26] Asrori S. Karni, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, (Jakarta, Logos, 1999), hlm. 52-55.

Cita-cita penegakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kerangka keislaman, merupakan akar semangat transformasi sosial secara terus menerus dalam islam. Semangat transformatif inilah yang menjadi predikat utama. ummah terbaik *(khairu ummah)* yang dimaksud dalam ayat 110 dari surah ali Imran tersebut adalah umat islam.[27]

Untuk meyakinkan bahwa *khairu ummah* itu adalah umat Islam, al-Wahidi an-Naisaburi[28] menjelaskan bahwa ayat ini turun pada peristiwa ketika Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Muadz bin Jabal serta Salim budak abu Khuzaifah berkumpul dua orang Yahudi yaitu Malik bin Ad- Dhaif dan Wahab bin Yahuza. Kedua orang Yahudi itu membanggakan agama dan umatnya dengan mengatakan: " agama kami lebih baik daripada agama kalian dan kami lebih utama dan mulia dari pada kalian" kemudian ayat ini turun untuk meluruskan bahwa umat yang terbaik adalah umat Islam.

kemudian dalam karyanya yang berjudul *"Tema Pokok Al-Qur'an"* Fazlur Rahman, secara panjang lebar menuliskan historisitas tentang lahirnya masyarakat muslim, setidaknya dari penjelasan ini bisa memberikan informasi bahwa *"khairu ummah"* itu adalah kaum muslimin atau masyarakat islam.

Ada dua perkembangan yang terjadi di Madinah waktu itu, *pertama,* adalah wahyu-wahyu Allah yang terdahulu – Taurat dan Injil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi,* (Bandung, Mizan, 1994), hlm. 336.

[28] Abu al- Hasan Ali Bin Ahmad Al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbab an-Nuzul,* (Dar al- Fikr, t. th), hlm. 78

– disebutkan namanya. Hal ini berbeda dengan di Mekkah dimana kitab injil hampir tidak pernah disinggung. Perkembangan penting *kedua,* yang terjadi di Madinah – yang juga terlihat dengan jelas didalam Surah Al-Maidah ayat 48, Allah berfirman[29] – adalah pengakuan terhadap adanya tiga kaum yang masing-masing berdiri sendiri: Yahudi, Kristen dan Muslim. Istilah-istilah Mekkah *Ahzab* dan *Syiya'*[30] tidak dipergunakan lagi di Madinah. Istilah-istilah tersebut digantikan dengan istilah *ummah* atau istilah kolektif dari "ahli-ahli kitab" *(ahl-al-kitab)* dan setiap ummah ini diakui mempunyai hukum-hukumnya sendiri. Al-Qur'an tidak berpaling kepada Ibrahim untuk memberikan validitas kepada kaum muslimin, kini dengan cara tertentu Al-Qur'an mengakui validitas kaum Yahudi dan Kristen, walaupun demikian kaum muslimin tetap dipandangnya sebagai *ummah* (kaum) "ideal" atau "yang terbaik" *(khairu ummah).*

Ummah dalam pengertian diatas menurut Dr. Setiawan Budi Utomo adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[29] " *Dan kami telah turunkan kepadamu Al-qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang telah diturunkan sebelumnya, (yaitu kitab-kitab) dan batu ujian terhadap kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dean janganlah kamun memperturutkan hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kamu akan kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.*"

[30] *al-Ahzab* (tunggalnya: *Hizb* yang berarti partisan atau sektarian) atau orang-orang yang memecah belah kaum agama, tetapi dalam penggunaannya dibelakang hari, ahzab berarti pecahnya sebuah kebenaran menjadi sekte-sekte – Sehubungann dengan hal ini – perkataan *ahzab* dan *Syiya'* (tunggal *Syi'a* yang artinya partisan atau sekte) dipergunakan dengan pengertian yang sama – lihat – Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an,* (Bandung, Pustaka, 1996), hlm. 203-206

secara universal dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi *amar ma'ruf nahi munkar.*[31]

Lebih lanjut Setiawan mengatakan, bahwa firman Allah dalam surah Ali imran: 110 tersebut adalah sebagai piagam *ummah*, sumber kelahirannya dan sekaligus sumber konstitusinya. Ia adalah perserikatan ummat manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kehendak ilahi. Ia adalah suatu pranata kosmik, karena hanya melalui persatuan seperti itulah bagian yang lebih tinggi dari kehendak ilahi, yakni yang bersifat moral, dapat menjadi sejarah. Karena bagian ini menuntut kabebasan dari pelakunya, maka ummah yang merupakan kumpulan dari para pelaku moral, haruslah bebas dan terbuka pula.[32] Kehendak ilahi tersebut telah dinyatakan dalam bahasa Qur'an, dan dikonkritkan dalam tindakan-tindakan nabi SAW. Kemudian telah diterjemahkan kedalam aturan-aturan kehidupan keseharian Nabi, para sahabat dan ahli-ahli hukum. Karenanya, menurut setiawan Ummah atau masyarakat muslim, tidak diperintah oleh penguasa ataupun rakyat. Keduanya dibawah kekuasaan hukum, pemerintah hanyalah pelaksana dari hukum tersebut.

Doktrin dan paradigma "*khairu ummah*" inilah yang mengilhami dan sekaligus sebagai landasan filosofis bagi pembentukan masyarakat Islam dan inilah visi *ummah* tentang nilai-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[31] Setiawan Budi Utomo,"Doktrin *Khairu Ummah* Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Masyarakat Islam", Pengantar penerjemah dalam Yusuf al Qardhawy, *Anatomi Masyarakat Islam*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. x.

[32] *Ibid*

nilai esensial dan elemen-elemen substansial bagi perwujudan masyarakat madani dalam pengertiannya yang independen sebagai terminologi Islam yang orisinal dan genuin dengan epistimologinya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah-historis yakni derifasi dari *"mujtama' al madinah"* (masyarakat yang mengaplikasikan nilai-nilai Ilahiyah dan insaniah dimasa Rasulullah di Madinah) dan dari kata *"madaniah"* (masyarakat yang *civilized;* berperadaban dan beradab).[33]

2. Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Beriman Kepada Allah

Kuntowijoyo menterjemahkan ketiga tema diatas sebagai proses-proses humanisasi, liberasi, dan transendensi yang menjadi ciri atau persyaratan untuk menjadi umat terbaik *(khairu ummah)*. Disini, khususnya humanisasi *(amar ma'ruf)* dan liberasi *(nahi munkar)* menurut kuntowijoyo masing-masing mempunyai signifikansi sosial.

Meskipun ada anggapan bahwa umat islam adalah umat terbaik secara otomatis, namun perlu kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah pantas disebut terbaik jika disebagian besar umat islam didunia ini terdapat kekumuhan, kekacauan, ketidak adilan, permusuhan internal, dan kejadian-kejadian yang naif lainnya termasuk kemiskinan kebodohan.[34] Oleh karena itu, sangat penting pula kita mengangkat pemahaman Ali Imran:110, dimana umat yang terbaik itu telah pernah terwujud ketika umat islam benar-benar memenuhi ketiga syarat yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[33] *Ibid*, hlm, xi.

[34] Lihat Khoiruddin, *Membangun Sistem Masyarakat Islam; Studi Atas Pemikiran Yusuf Qardhawy*, dalam Jurnal Populis Edisi No. III/ 2003, (Yogyakarta, Elsaq, 2003), hlm. 104

termaktub dalam QS 3:110 itu, amar ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah.[35]

a. ***Amar Ma'ruf (Humanisasi)***

Menurut pandangan Qodri azizy, konsep *amar ma'ruf* haruslah meliputi konsep baik menurut akal. Artinya, *ma'ruf* disamping konsep keagamaan juga bisa meliputi konsep keduniaan, termasuk sistem sosial, ekonomi pendidikan, politik, sain, yang sekiranya baik dan bermanfaat untuk manusia didunia yang dengan kebaikan tersebut mempunyai akibat baik pula diakhirat kelak.

Walaupun dengan bahasa yang berbeda namun mepunyai esensi yang sama, Kuntowijoyo menulis bahwa, dalam bahasa sehari-hari amar ma'ruf berarti apa saja, dari hal-hal yang sangat individual seperti dalam hal ibadah dalam arti sempit, serta hal yang bersifat kolektif seperti menciptakan pemerintahan yang bersih, mengusahakan jamsostek dan membangun *civil society* (masyarakat madani)[36]

b. ***Nahi Munkar (liberasi)***

Disisi lain, konsep liberasi *(nahi munkar)* juga meliputi konsep akal yang tidak lepas dari kenyataan dunia. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan, manipulasi, korupsi, polusi/pencemaran,

---

[35] A. Qodri Azizy, "*Reaktualisasi dan Sosialisasi Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Konteks keagamaan*" dalam Takdir Ali Mukti Dkk, *Membangun Moralitas Bangsa*, (Yogyakarta, LPPI, 1998)hlm.19.

[36] Kuntowijoyo, *ibid*, hlm. 364-365.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lebih-lebih kezaliman, dan semacamnya juga termasuk dalam pengertian munkar[37] sesuai dengan hal ini pula, maka aspek-aspek yang menjadi sasaran nahi munkar (liberasi) meliputi empat hal. *Pertama,* liberasi sistem pengetahuan, yaitu usaha-usaha untuk membebaskan orang dari sistem pengetahuan materialistis, dari dominasi struktur, misalnya dari kesadaran kelas dan sek. *Kedua,* liberasi sistem sosial, ialah pembebasan dari belenggu-belenggu sosial yang menghambat perkembangan masyarakat. *Ketiga,* liberasi sistem ekonomi, yakni pembebasan dari belenggu-belenggu sistem ekonomi yang diakibatkan oleh adanya dualisme ekonomi antara sektor tradisonal dan sektor modern yang timbul karena preferensi politik yang pada akhirnya menyebabkan kesenjangan ekonomi. Dan keempat, liberasi sistem politik, yakni membebaskan sistem otoritarianisme, diktatorisme, dan neo-feodalisme.[38]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. ***Tu'minuna billah (Transendensi)***

Dalam memahami istilah yang dipakai oleh Al-Qur'an Surah 3:110, yakni *tu'minuna billah,* padanan kata yang ditawarkan Kuntowijoyo yaitu transendensi.[39] Istilah ini dipakai

---

[37] Qodri Azizy, *Op. Cit*, hlm. 28

[38] Kuntowijoyo, 370-271.

[39] Kata *Transendensi* berasal dari bahasa Latin *Trancendere* berarti "naik keatas", bahasa Inggris *to tracend* ialah "menembus", "melewati", "melampaui", artinya perjalanan diatas atau diluar. Lihat, Kuntowijoyo, *Ilmu Sosial Profetik; Etika Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial,* dalam *Journal Of Islamic Studies Al-Jami'ah* No. 61, th. 1998.

dalam beberapa bidang, seperti sastra, filsafat, mistik, dan teologis. Dalam bidang terakhir inilah sebagai transendensi yang dimaksud.

Dalam teologi Islam transendensi berarti beriman kepada Allah, dan percaya kitab-kitab Allah, dan hari akhir. Namun transendensi *(tu'minuna billah)* akan berhadapan dengan kecendrerungan materialisme dan sekularisme. Karena itu, meskipun beriman kepada Allah sangat penting untuk memberi rujukan kepada prinsip *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* (humanisasi dan liberasi), namun implementasi prinsip transendensi itu dilakukan dengan bijaksana. Kuntowijoyo mengemukakan:

> Transendensi kedalam tidak ada persoalan tetapi transendensi keluar perlu kehati-hatian. Kedalam, yang serba subyektif, yang serba syar'I yang memang hanya untuk umat islam sendiri tidak masalah. Keluar, yang intersubyektif, mestilah dibuat lunak, obyektif, supaya islam dimengerti secara universal. Kedalam, kita terima sepenuhnya otoritas Allah, tetapi keluar, kita harus pandai berbicara dengan bahasa yang orang lain mengerti.[40]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Pemahaman Tentang Masyarakat Madani

Secara historis, menurut Nurcholish Madjid wujud nyata masyarakat madani muncul pertama kali pada masa nabi Muhammad saw. Pada hakikatnya, masyarakat madani yang dikembangkan oleh Nabi saw. Merupakan "reformasi total terhadap masyarakat tak kenal hukum *(lawless)* Arab Jahiliyah dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi

[40] Kuntowijoyo, *Muslim*, hlm. 261.

seorang penguasa seperti yang selama itu menjadi pengertian umum tentang negara[41] Lebih lanjut dikatakan:

> Bukanlah suatu kebetulan bahwa wujud nyata masyarakat madani itu untuk pertama kalinya dalam umat manusia merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad saw. Sesampai Nabi dikota hijrah, yaitu Yatsrib (Yunani: Yethroba), beliau ganti nama itu menjadi Madinah. Dengan tindakan itu, Nabi saw. Telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani.[42]

Azyumardi Azra', dalam buku *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan tantangan.* memahami bahwa masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro-demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu kekehidupan masyarakat yang berkualitas dan bertamaddun *(civility).* Sivilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Itu berarti, tidak ada satu pihak manapun, termasuk pemerintah dan gerakan-gerakan pro-demokrasi yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya sendiri, apakah dengan bentuk kooptasi, regementasi, apalagi dengan huru hara yang pada gilirannya hanya menimbulkan *lawlessnes* dan *social cost* yang sering amat mahal.[43]

Sebab itu, seluruh sektor masyarakat, terutama gerakan, kelompok, dan individu-individu independen yang *concerned* dan *commited* pada demokratisasi dan masyarakat madani seyogyanya mengambil strategi

---

[41] Nurcholish Madjid , Pluralsime, teladan Dari piagam Madinah, dalam Sufyanto, Luluk Rofiqoh (peny), *Puasa Titian Menuju Rayyan,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 125

[42] *Ibid,* hlm. 126. Lihat juga, Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid,* (Yogyakarta, LP2IF, 2001), hlm. 115

[43] Azyumardi Azra', *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan,* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang lebih subtil, lebih halus, lebih *bertamaddun;* bukan mengambil jalan konfrontasi langsung yang tidak mustahil akan mengorbankan aktor-aktor masyarakat madani sendiri.

Dalam karyanya yang berjudul *Demokrasi dan Civil Society,* AS Hikam mengemukakan bahwa, konsep *civil society* merupakan sebuah konsep yang terkait dengan pengalaman Barat.[44] Bahkan kalau dirunut kebelakang. *Civil society* sejak Aristoteles dan Cicero. Dalam konteks ini, Hikam mengakui bahwa konsep *civil society* mengalami pemaknaan yang berubah-ubah sesuai dengan konteks zamannya. JJ. Rousseau, misalnya, mendefinisikan *civil society* sebagai negara, dimana salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.[45]

Kemudian AS Hikam melakukan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *civil society.* Dalam salah satu pembahasannya, Hikam menulis:

> Pengertian *civil society* yang saya pergunakan dalam buku ini bersifat eklektik, walaupun acuan utamanya adalah pengertian yang dipergunakan oleh de Tocqueville. *Civil society* dapat didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan *(voluntary),* keswasembadaan *(self generating),* dan keswadayaan *(self supporting),* kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan tinggi dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.[46]

Dalam pandangan AS Hikam, penerjemahan *civil society* menjadi masyarakat madani mengandung persoalan serius, khususnya kita seorang memperbincangkan konsep tersebut pada tataran visi. Dengan

---

[44] M. AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society,* (Jakarta, LP3ES, 1996), hlm. 1.
[45] *Ibid*
[46] *Ibid*, hlm. 3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menggunakan istilah masyarakarat madani, apalagi lalu melacak jauh keakar-akar civil society sampai pada masyarakat Islam dizaman Nabi di Madinah, maka terkesan ada upaya terselubung untuk menjadikan Islam sebagai alternatif bagi *civil society*. Hikam secara tegas menolak untuk mencari landasan konseptualisasi yang islami atas *civil society*[47]

Salah satu titik krusial dari penolakan Hikam atas penyepadanan istilah *masyarakat madani* dengan *civil society* terletak pada hubungannya dengan negara. Sebagaimana penggunaan *civil society* di Eropa Timur, Hikam tampak lebih menekankan pentingnya kontrol terhadap perilaku negara yang cenderung dominatif. Oleh karenanya, dalam rangka melakukan fungsi kontrol, *civil society* harus berada diluar negara. Jika tidak, eksponen *civil society* sama dengan menjadi bagian dari negara *(Political society)* yang cenderung hegemonik, dan karenamya, meskipun bersuara tentang *civil society*, sebenarnya mereka telah terkooptasi oleh kepentingan negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cara pandang itu berbeda dari Nurcholish Madjid yang lebih menekankan unsur "madani" atau keadaban dari konsep *civil society* dengan tidak begitu memperhatikan kandungan fungsi kontrol yang harus dijalankan atas kecenderungan umum perilaku negara. Oleh karenanya, tidak hanya masyarakat yang dapat mewujudkan nilai-nilai masyarakat madani, tetapi juga negara atau keduanya secara bersama-sama. Negara

---

[47] Lihat M. AS Hikam, " Nahdlatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pembangunan", dalam kata pengantar untuk Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani ; Arkeologi Pemikiran Civil society dalam Islam Indonesia*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 9

dan masyarakat seakan tidak perlu dipertentangkan karena penjabaran suatu nilai dapat dilakukan oleh kedua institusi tersebut.

Dari pandangan Nurcholish Madjid tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pilihan terhadap konsep masyarakat madani berada dalam kerangka integrasi Islam dengan negara dan bukan dalam kerangka membangun suatu kekuatan sosial yang mampu berhadapan dengan negara. Itulah sebabnya M. Dawam Rahradjo dengan hati-hati tidak menyebut masyarakat madani sebagai sebagai sesuatu yang identik dengan *civil society*. Namun demikian, Dawam setuju jika secara konseptual teori-teori *civil society* sangat berguna bagi pengembangan wacana masyarakat madani.[48] Artinya, meminjam ungkapan Sufyanto, bahwa dalam konteks ke Indonesiaan pengembangan wacana masyarakat madani haruslah bersifat inklusif, disamping harus berkiblat kapada kehidupan kemasyarakatan Rasul juga mengambil sebuah perbandingan dengan *civil society* yang berkembang di Barat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tanpa bermaksud meminimalisasi peran intelektual M. Dawam Rahardjo dalam wacana *civil society* di Indonesia, sejumlah karyanya yang muncul memperlihatkan semangat yang sangat dekat dengan yang dikembangkan secara intensif oleh Nurcholish Madjid. M.Dawam Rahardjo lebih memilih "masyarakat madani" sebagai terjemahan dari *civil society*, dari pada misalnya istilah "masyarakat sipil", "masyarakat warga" yang kemudian banyak dikembangkan oleh kalangan lain di

[48] Hendro Prasetyo, *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2004), hlm. 271.

Indonesia. Hal ini dapat dideteksi melalui pernyataan Dawam bahwa masyarakat madani untuk *civil society*, adalah kebetulan dan tepat.[49]

Bahkan sebagaimana sering diungkapkan, Dawam lebih melihat bahwa masyarakat madani sesungguhnya lebih dekat dengan dengan konsep "masyarakat utama" *(khairu ummah)* [50] Dalam konsep ini tidak terdapat pemilahan atau penghadapan antara masyarakat dan negara. Ia justru memandang penting adanya negara yang kuat sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang modern, sejahtera dan berkeadilan.

Kemudian, persoalan muncul ketika timbul pertanyaan, Bagaimana pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo tentang *"khairu ummah"* itu, dan hubungannya dengan masyarakat madani ?. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengulas lebih lanjut hal tersebut melalui sripsi yang berjudul *"Pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo Tentang "khairu umah" dalam Qur'an Surah Ali Imran: 110, Hubungannya Dengan Masyarakat Madani"*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[49] Lihat, M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, LP3ES, 1999), hlm. 146.

[50] M. Yunan Yusuf (Ed), *Masyarakat Utama* (Jakarta, Pusat Dakwah Muhammadiyah, 1995)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini bersifat kepustakaan murni *(library research)*. Yang objek kajiannya adalah pemahaman seorang tokoh. Yaitu, Muhammah Dawam Rahardjo Tentang *"khairu ummah"* dalam Al Qur'an Surah Ali Imran:110 hubungannya dengan masyarakat madani.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif- analitik, dimana penyusun mencoba menguraikan pemahaman Muhammad Dawam Rahardjo tentang khairu ummah yang terdapat dalam Surah ali Imran: 110, yang dilanjutkan dengan menganalisa penelitian dan posisi pemahaman tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat madani

3. Tehnik Pengumpulan Data

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam proses pengumpulan data, penyusun menggunakan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, artikel, ensiklopedi maupun dari sumber-sumber terkait lainnya.

Sumber primer yang dijadikan acuan adalah buku yang dikarang oleh Muhammad Dawam Rahardjo sendiri, yang berjudul *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial dan Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci.*

Sedangkan sumber sekunder dalam penulisan ini adalah karangan dan tulisan lain M. Dawam Rahardjo sendiri maupun karya para penulis lain yang terdapat diberbagai tempat dan dalam berbagai bentuk.

4. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi *(contents analisysis)*. Yang dimaksud analisis isi *(contents analysis)* adalah pemahaman secara konsepsional yang berkelanjutan didalam deskripsi,[51] Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam *content analisis* adalah sebagai berikut:[52]

a. Membaca secara kritis sumber data yang telah disebut, termasuk didalamnya mengkritisi pemahaman M. Dawam Rahardjo tentang fokus masalah.

b. Mengklarifikasi lambang-lambang yang ditulis oleh M. Dawam Rahardjo maupun sumber-sumber lain yang relevan dengan fokus masalah, kemudian dicari temuan-temuan penting yang terkait dengan masalah tersebut.

c. Melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan penting untuk dicari dan dirumuskan relevansinya dengan Pemberdayaan Masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[51] Louis O. Katsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1992), hlm. 1.

[52] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rajawali Press, 2003), hlm. 84-85

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan berbagai hal di atas untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap kajian itu serta memperoleh gambaran yang jelas dan terarah secara sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini akan tersusun sebagai berikut:

Di dahului dengan bab pertama yang berupa pendahuluan, yakni mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tela'ah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menghadirkan deskriptif biografi Muhammad Dawam Rahardjo. Yang meliputi asal kelahiran, pendidikan serta pengalaman, latar belakang pemikiran, kegiatan dan karir, kemudian di lanjutkan dengan pemikiran-pemikiran dan karya intelektualnya.

Bab tiga, merupakan pandangan Muhammad Dawam Rahardjo tentang *khairu ummah*, di awali dengan pembahasan tentang *ummah* dalam Al-Qur'an dan di teruskan dengan pengertian *khairu ummah*, *amar ma'ruf* serta *nahi munkar*, selanjutnya pembahasan di fokuskan pada tema Madinah dan perwujudan *khairu ummah* dalam konteks keIndonesiaan.

Bab empat penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun hanya memakai metode analisis data *contents anayisis* dengan tidak menggunakan metode *interview* yang di khawatirkan terjadinya *miss interpretation* dari penyusun dalam menafsirkan pandangan Muhammad Dawam Rahardjo tentang *kahiru ummah*, namun studi ini telah berusaha mendeskripsikan pemahaman M. Dawam Rahardjo tentang *khairu ummah*, dalam QS. Ali Imran: 110, hubungannya dengan masyarakat madani.

Kemudian berdasarkan seluruh uraian tentang pemahaman M. Dawam Rahardjo tentang fokus permasalahan. Penyusun telah menemukan bahwa:

1. Dalam melakukan konseptualisasi *"khairu ummah"*, M. Dawam Rahardjo menggunakan metode penafsiran *mawdhu'i* atau metode penafsiran tematis. Metode ini di lakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat dan istilah-istilah kunci Al-Qur'an yang berhubungan dengan masyarakat. Seperti, *Ummah, Khair, Madinah, amar ma'ruf, dan nahi munkar*. Sehingga di temukan pemahaman yang relevan dengan fokus peramasalahan.

   Dawam, kemudian membantu penafsiran ini dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, yakni sebuah pendekatan yang mengembalikan Al-Qur'an kepada konteks di mana ia di turunkan. Dalam pendekatan ini, di perhatikan pula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kisah-kisah para Nabi dan Rasul yang di ceritakan dalam Al-Qur'an. Dalam rangka "menyetubuhkan" pesan-pesan moral Al-Qur'an yang telah di tangkap dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis dalam konteks kemoderman. Artinya, pemahaman terhadap situasi historis dewasa ini sangat di perlukan. Oleh karena itu, menurut M. Dawam Rahardjo, pemahaman terhadap realitas dewasa ini sangat memerlukan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Karenanya, Dawam membantu pendekatannya tersebut dengan pendekatan historis-struktural.

2. Berdasarkan QS. Ali Imran: 110, dalam pandangan M. Dawam Rahardjo, yang dimaksud dengan *khairu ummah* adalah suatu masyarakat yang belandaskan iman *tawhid* kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yeng menegakkan yang baik *(ma'ruf)* dan mencegah yang buruk *(munkar)*. Masyarakat seperti itu harus dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi yang memilki visi dan pedoman perilaku.

   Masyarakat yang di gambarkan oleh Al-Qur'an tersebut, menurut Dawam adalah masyarakat yang berproses menuju dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai keutamaan *(khair)*, yang landasannya adalah iman tawhid dalam melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Oleh karenanya, masyarakat yang demikian di identikkan oleh Dawam sebagai *al Madinah Fadhilah* (masyarakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

utama), sebuah konsep yang pernah di rekonstruksi oleh Filsuf Muslim abad pertengahan, Al-Farabi.

3. Dalam rangka perwujudan *khairu ummah* dalam konteks keIndonesiaan, Dawam memakai teori-teori masyarakat sipil *(civil society)*, dari sini M. Dawam Rahardjo memberikan tiga cara yang harus ditempuh, *pertama*, dengan memperluas golongan menengah melalui pembangunan ekonomi yang lebih terarah. *Kedua*, memberdayakan sistem politik dengan menciptakan kerangka kelembagaan yang lebih kondusif terhadap proses demokratisasi. Dan *ketiga*, dengan upaya-upaya penyadaran dan pendidikan politik, tidak saja dilapisan menengah kebawah, tetapi dikalangan elite politik.

   Adapun yang ditekankan oleh Dawam sebagai pendukung terhadap agenda pemberdayaan masyarakat dan demi terwujudnya *khairu ummah* adalah para cendekiawan atau intelektual *(ulul albab)* yang membentuk lembaga dan oraganisasi *volunter* (suka rela) dalam masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran

Dari studi yang dilakukan tersebut diatas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan yang perlu kiranya untuk dipertimbangkan. Diantaranya, *pertama*, bahwa banyak istilah-istilah al-Qur'an yang sudah dibakukan sebagai bagian dari bahasa Indonesia, seringkali kurang disadari, padahal jika ia disadari sebagai nilai-nilai yang berasal dari Islam, maka akan menjadi kekuatan yang memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Untuk itu, perlu kiranya dilakukan gerakan-gerakan spiritual dan kultural dengan menanamkan nilai-nilai etis Islam secara luas, sehingga terbentuk sebuah masyarakat etis baru yang disertai dengan pranata-pranata dan lembaga baru.

Kedua, perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih khusus lagi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, bukan hanya dalam dataran teoritis, tetapi juga dalam dataran empiris. Dari sini, disamping diketahui bagaimana peran dan aktualisasi nilai-nilai islam khususnya amar ma'ruf nahi munkar yang diharapkan dapat ditegakkan, setidak-tidaknya sebuah pemahaman-pemahaman baru jika bukan teori baru yang berkaitan dengan cita-cita kemasyarakatan menurut Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Penutup

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Sang Khaliq yang Maha Penyanyang, yang selalu menyanyangi hamba-Nya dan Maha Pengasih, yang memberikan rasa semangat sehingga penulis dapat menyelesikan penulisan skripsi ini.

Meskipun penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin untuk dapat menghasilkan skripsi yang baik dan sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi cita-cita Ilahiyah.

Semoga kesederhanaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan ni'mat-Nya agar selalu mensyukurinya dan menunjukkan jalan yang diridhoi-Nya hingga hari kelak. *Amiin*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokrasi Dalam Islam Indonesia*, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.

Ali, Fachry, Bahtiar Efendy, *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung, Mizan, 1986.

Ali Fauzan,. Ihsan dan Haedar Baqir (ed), *Mencari Islam; Kumpulan Otobiografi Intelektual Kaum Muda Muslim Indonesia angkatan 80-an*, Bandung, Mizan, 1993.

Azra', Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004.

A. Efendy Edy (ed), *Dekonstruksi Mazdhab Ciputat*, Bandung, Pustaka Zaman, 1999

Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo, t.p, 1972

Arifin, Syamsul, *Islam Indonesia; Sinergi Membangun Civil Islam Dalam Bingkai Keadaban Demokrasi*, Malang, UMM Pres, 2003

Al-Qardhawy, Yusuf, *Anatomi Masyarakat Islam*, Setiawan Budi Utomo (Penj), Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999.

Abu al- Hasan Ali bin Ahmad al- Wahidi an- Naisaburi, *Asbab an- Nuzul*, Dar al- Fikr, t. th

Anwar, M. syafi'I, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta, Paramadina, 1995.

Ali Fauzi, Nasrullah (Ed), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung, Mizan, 1995

Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Press, 2003

Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani; Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan cita-Cita Reformasi*. Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Carvallo, Basco dan Dasrizal (ed), *Aspirasi Umat islam Indonesia*, Jakarta, Lappenas, 1983

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Departemen Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, Mahkota, 1998.

Efendy, Djohan dan Ismed Natsir (peny), *Pergolakan Pemikiran Islam; Catatan Harian Ahamad Wahib*, Jakarta, LP3ES, 1995.

Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung, Pustaka, 1996.

Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, LP3ES, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1997

Hielmy, Irfan, *Bunga Rampai Menuju Khairu Ummah*, Ciamis, PP Al-Fadliliyah Darussalam, 1994

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid; Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendensi*, Bandung, Mizan, 2001

_____, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi, Bandung, Mizan*, 1994

Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Jakarta, Paramadina, 1999.

Mahasin, Aswab (Ed), *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa; Wacana Antar Agama dan Bangsa*, Jakarta, Yayasan Festival Istoqlal, 1999.

Mukti, Ali, Takdir, dkk, *Membangun Moralitas Bangsa (Amar Ma'ruf Nahi Munkar: dari Subyektif-Normatif Ke Obyektif-Empiris*, Yogyakarta, LPPI UMY, 1998

G.S. Hodgson, Marshall, *The Venture Of Islam, Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia*, Mulyadhy Kartanegara (Terj), Jakarta, Paramadina, 1999.

O Katsoff, Louis, *Penguntar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1992

Rahardjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani; Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1999.

_____, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta, Paramadina, 2002

_____, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung, Mizan, 1993

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

_____, *(Ed), Mewujudkan Satu Ummat*, Jakarta, Pustaka Zaman, 2002.

_____, *Islam dan Transformasi Budaya*, Jakarta, LSAF, 2002.

_____, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa; Esai-Esai Tentang ekonomi, Sosial dan Politik*, Yogyakarta, UII Press, 1999

_____, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta, LSAF, 1999

_____, *Orde Baru dan Orde Transisi; Wacana Kritis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi*, Yogyakarta, UII Press, 1999

_____, *Perspektif Deklarasi Makkah; Menuju Ekonomi Islam*, Bandung, Mizan, 1991.

Ridwan, M. Deden dan Dewi Nurjulianti, *Pembangunan Masyarakat Madani dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta, LSAF, 1999.

Summa, Amin, *"M. Dawam Rahardjo Riwayat Hidup"; Keadilan Sosial Ekonomi Madani*, Jakarta, t.p

Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani*, Yogyakarta, LP2IF, 2001

Sufyanto, dan Luluk Rofiqoh (peny) *Titian Menuju Rayyan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000

S. Karni, Asrori, *Civil Society dan Ummah; Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*, Jakarta, Logos, 1999

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988

Prasetyo, Hendro, dan Muhannif Ali dkk, *Islam dan Civil Society; Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama, 2002.

Van Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa; Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta, LKiS, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wagian, Diangsa, *Etika Bisnis Dalam Pemikiran Islam Kontemporer; Studi Pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo*, Skripsi Fak. Syari'ah, 2003

Yusuf, M. Yunan, (et.al), *Masyarakat Utamu*, Jakarta, Pusat Dakwah Muhammadiyah, 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA